

FENOMENA GLOBAL PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN: PENYEBAB,
DAMPAK, DAN ANTISIPASI KEBIJAKAN DI INDONESIA

Domianus Fieldo¹, Airlangga Surya Kusuma², Nayla Daniesa³, Elis Safitri⁴, Syira
Iqlima⁵, Mohammad Daffa Pohan⁶

Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: 2310115088@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310115002@mahasiswa.upnvj.ac.id
airlanggasuryak@upnvj.ac.id, 2310115008@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310115010@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310115011@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Fenomena penurunan angka kelahiran secara global telah menjadi isu demografis yang mendesak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tren ini dari pengaruh faktor yaitu perubahan sosial, ekonomi, budaya, serta peningkatan akses terhadap pembelajaran dan pelayanan kesehatan reproduksi. Penelitian ini dengan tujuan mengidentifikasi penyebab utama penurunan angka kelahiran, menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan demografis yang ditimbulkan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia mengalami penurunan angka fertilitas dari 2,6 menjadi 2,18 dalam satu dekade terakhir, dengan dampak signifikan terhadap struktur usia penduduk, sistem jaminan sosial, dan dinamika ekonomi jangka panjang. Meskipun program keluarga berencana terbukti efektif menurunkan angka kelahiran, tantangan

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

seperti stagnasi program, urbanisasi, dan perubahan nilai budaya membutuhkan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan pro-natalitas yang terintegrasi dengan insentif sosial-ekonomi, peningkatan literasi kesehatan reproduksi, serta sinergi lintas sektor dalam pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap dinamika kependudukan.

Kata Kunci : Penurunan angka kelahiran, fertilitas, kebijakan demografi, bonus demografi, Indonesia

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada dekade terakhir, dunia menghadapi fenomena demografis yang signifikan, yaitu penurunan angka kelahiran secara global. Menurut laporan *World Fertility Report 2024* yang diterbitkan oleh United Nations, angka kelahiran global telah mengalami penurunan dari 4,8 anak per perempuan pada tahun 1970 menjadi sekitar 2,2 anak per perempuan pada tahun 2024, mendekati ambang batas *replacement level fertility* sebesar 2,1 (UN DESA, 2024). Fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Italia, dan Jerman, tetapi juga mulai terlihat di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Penurunan angka kelahiran dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari peningkatan akses terhadap pendidikan, khususnya bagi perempuan, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, perubahan nilai-nilai budaya terkait pernikahan dan memiliki anak, serta semakin luasnya akses terhadap kontrasepsi dan layanan

kesehatan reproduksi (BPS, 2021; UNFPA, 2022). Perubahan preferensi gaya hidup generasi muda dan tekanan ekonomi, seperti biaya hidup dan beban finansial membesarkan anak, juga menjadi faktor penting yang turut mempercepat tren penurunan fertilitas.

Di Indonesia, Total Fertility Rate (TFR) telah menurun dari 2,6 anak per perempuan pada tahun 2010 menjadi sekitar 2,18 pada tahun 2020 (BPS, 2021). Penurunan ini terjadi seiring dengan keberhasilan program keluarga berencana dan pembangunan sosial ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan baru. Meskipun pada satu sisi menunjukkan kemajuan dalam hal pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan taraf hidup, di sisi lain tren ini berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang seperti bonus demografi yang tidak optimal, ketimpangan struktur usia penduduk, dan potensi krisis tenaga kerja di masa depan.

Pengalaman negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan menjadi pelajaran penting, di mana penurunan fertilitas yang ekstrem menyebabkan populasi menua dengan cepat, menekan sistem jaminan sosial, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi akibat berkurangnya angkatan kerja produktif. Jika tidak diantisipasi sejak dini, Indonesia pun bisa menghadapi masalah serupa dalam satu atau dua dekade ke depan, terlebih dengan prediksi bahwa TFR Indonesia akan terus menurun dan bisa menyentuh angka 1,9 sebelum 2045 (McKinsey Global Institute, 2024).

Lebih lanjut, transformasi struktur demografi akibat penurunan angka kelahiran juga membawa konsekuensi terhadap kebijakan publik. Pemerintah perlu merancang strategi yang seimbang, tidak hanya fokus pada pengendalian populasi, tetapi juga pada insentif untuk keluarga muda, kebijakan kerja yang ramah keluarga, penguatan perlindungan sosial, serta penciptaan ekosistem yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga. Oleh karena itu, memahami penyebab, dampak, dan strategi kebijakan terhadap fenomena ini menjadi penting sebagai pijakan bagi perencanaan pembangunan jangka panjang Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan penurunan angka kelahiran secara global dan di Indonesia?
2. Apa dampak sosial dan ekonomi dari penurunan angka kelahiran bagi Indonesia?
3. Kebijakan apa yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dan mengelola dampak dari penurunan angka kelahiran?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan analisis “Fenomena Global Penurunan Angka Kelahiran: Penyebab, Dampak, dan Antisipasi Kebijakan di Indonesia” Ini dilakukan, antara lain:

1. Mengenali dan menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan penurunan tingkat kelahiran secara global dan di Indonesia.
2. Mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari penurunan angka kelahiran terhadap struktur demografi dan pembangunan nasional Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dan mengantisipasi dampak dari penurunan angka kelahiran.

2. Telaah Pustaka

2.1 Konsep Angka Kelahiran dan Fertilitas

Dalam kajian demografi, angka kelahiran dan fertilitas merupakan indikator fundamental yang digunakan untuk memahami dinamika populasi suatu wilayah atau negara. Angka kelahiran (crude birth rate) adalah ukuran jumlah kelahiran hidup yang terjadi selama satu tahun di suatu wilayah per 1.000 penduduk (Badan Pusat Statistik [BPS], 2020). Angka ini mencerminkan tingkat reproduksi alami suatu

populasi dan menjadi tolok ukur penting dalam perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan penduduk.

Namun, angka kelahiran saja tidak cukup untuk menggambarkan pola reproduksi dalam suatu populasi karena angka ini sangat dipengaruhi oleh struktur usia penduduk. Oleh karena itu, konsep fertilitas diperkenalkan sebagai ukuran yang lebih spesifik mengenai kemampuan reproduksi perempuan. Fertilitas umumnya diukur dengan menggunakan Total Fertility Rate (TFR), yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang periode reproduksinya (usia 15–49 tahun), apabila tingkat fertilitas pada suatu periode tertentu berlaku terus menerus (United Nations, 2019). TFR merupakan indikator penting untuk mengukur kecenderungan reproduksi perempuan dan memprediksi pertumbuhan populasi di masa depan.

Selain TFR, terdapat indikator fertilitas lain seperti Age-Specific Fertility Rate (ASFR) yang mengukur jumlah kelahiran hidup per 1.000 perempuan dalam kelompok umur tertentu dalam periode waktu tertentu (World Health Organization [WHO], 2021). ASFR memberikan gambaran rinci mengenai distribusi fertilitas berdasarkan kelompok umur, sehingga dapat menganalisis pola reproduksi di berbagai fase usia.

Perbedaan utama antara angka kelahiran dan fertilitas terletak pada cakupannya. Angka kelahiran merupakan ukuran makro yang mencerminkan kelahiran dalam populasi secara keseluruhan, tanpa memperhatikan struktur usia atau karakteristik individu, sedangkan fertilitas merupakan ukuran mikro yang menggambarkan perilaku reproduksi individu atau kelompok perempuan (Bongaarts, 2017). Sebagai contoh, sebuah negara dengan populasi yang relatif muda dan banyak wanita usia subur cenderung memiliki angka kelahiran tinggi, meskipun fertilitas per perempuan bisa jadi rendah.

Penurunan angka kelahiran yang terjadi secara global, termasuk di Indonesia, seringkali berawal dari penurunan fertilitas. Penurunan fertilitas disebabkan oleh

berbagai faktor sosial dan ekonomi, seperti peningkatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan, peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi, urbanisasi, perubahan nilai budaya terkait keluarga dan anak, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengendalian kelahiran, seperti program Keluarga Berencana (KB) (BPS, 2020; United Nations, 2019). Misalnya, perempuan yang lebih lama menempuh pendidikan cenderung menunda menikah dan memiliki anak, sehingga jumlah anak yang dilahirkan juga berkurang.

Selain itu, kemajuan teknologi kontrasepsi dan penyuluhan kesehatan reproduksi membuat pasangan dapat lebih mudah mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, yang secara langsung menurunkan fertilitas dan angka kelahiran (Bongaarts, 2017). Penurunan angka kelahiran ini memiliki dampak luas terhadap struktur demografi, seperti perubahan proporsi penduduk usia produktif dan usia lanjut, yang kemudian mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial, seperti tenaga kerja, sistem pensiun, dan layanan kesehatan (United Nations, 2019).

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai konsep angka kelahiran dan fertilitas, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam mengantisipasi perubahan demografis dan meminimalisir dampak negatif penurunan angka kelahiran serta memanfaatkan peluang dari perubahan struktur penduduk. Oleh karena itu, pengukuran dan analisis angka kelahiran dan fertilitas menjadi dasar penting dalam studi demografi dan perencanaan pembangunan nasional.

2.2 Teori-Teori Penurunan Angka Kelahiran

Penurunan angka kelahiran merupakan fenomena demografis yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan mekanisme dan proses yang menyebabkan penurunan angka kelahiran di berbagai negara, termasuk Indonesia. Memahami teori-teori ini sangat penting agar dapat merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengelola perubahan demografi.

2.2.1 Teori Transisi Demografi

Teori Transisi Demografi merupakan teori klasik yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan perubahan struktur penduduk dari kondisi dengan angka kelahiran dan kematian yang tinggi menuju kondisi angka kelahiran dan kematian yang rendah (Notestein, 1945). Teori ini menggambarkan empat tahapan perkembangan demografi:

- *Tahap pra-transisi* dengan angka kelahiran dan kematian yang tinggi dan hampir seimbang, sehingga pertumbuhan penduduk rendah.
- *Tahap transisi awal* di mana angka kematian mulai menurun secara signifikan akibat kemajuan teknologi medis dan peningkatan kondisi hidup, sementara angka kelahiran masih tinggi sehingga pertumbuhan penduduk meningkat pesat.
- *Tahap transisi lanjut* di mana angka kelahiran mulai menurun karena perubahan sosial dan ekonomi, termasuk urbanisasi, pendidikan, dan pergeseran nilai budaya.
- *Tahap pasca-transisi* dengan angka kelahiran dan kematian yang rendah dan stabil, sehingga pertumbuhan penduduk melambat atau bahkan negatif.

Penurunan angka kelahiran pada tahap transisi ini sering disebabkan oleh perubahan pola perilaku reproduksi, termasuk penurunan jumlah anak yang diinginkan, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi, dan pergeseran peran gender dalam masyarakat (United Nations, 2019). Indonesia saat ini berada pada tahap transisi lanjut, dimana angka kelahiran terus menurun seiring dengan kemajuan sosial dan ekonomi.

2.2.2 Teori Ekonomi tentang Fertilitas

Menurut teori ekonomi, keputusan untuk memiliki anak merupakan hasil pertimbangan rasional keluarga terkait biaya dan manfaat anak. Becker (1960) menjelaskan bahwa anak dianggap sebagai "barang" yang memiliki nilai ekonomi—ada biaya yang harus dikeluarkan (misalnya, biaya pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan), dan ada manfaat yang diperoleh (seperti tenaga kerja, warisan, dan kepuasan emosional). Ketika biaya memiliki anak meningkat, khususnya di negara-negara berkembang yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi, keluarga cenderung mengurangi jumlah anak yang diinginkan.

Selain itu, peran perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan yang semakin meningkat juga menambah biaya peluang (opportunity cost) memiliki anak, sehingga perempuan cenderung menunda menikah dan membatasi jumlah anak (Becker, 1991). Teori ini menegaskan bahwa perubahan ekonomi, termasuk pendapatan keluarga, biaya pendidikan, dan kesempatan kerja perempuan, berperan besar dalam menurunkan fertilitas dan angka kelahiran.

2.2.3 Teori Sosial dan Budaya

Teori sosial dan budaya menekankan pentingnya nilai-nilai, norma, dan praktik budaya dalam mempengaruhi keputusan reproduksi. Cleland dan Wilson (1987) berpendapat bahwa perubahan nilai keluarga tradisional dan norma sosial berperan penting dalam penurunan angka kelahiran. Modernisasi, urbanisasi, dan peningkatan pendidikan menyebabkan perubahan sikap terhadap keluarga dan anak, termasuk keinginan untuk memiliki keluarga kecil yang lebih berkualitas daripada jumlah anak yang banyak.

Selain itu, meningkatnya kesadaran akan hak reproduksi dan akses terhadap informasi serta layanan kontrasepsi memungkinkan pasangan untuk mengontrol

kelahiran sesuai dengan keinginan mereka. Perubahan pola hidup masyarakat modern juga menimbulkan tekanan sosial untuk menunda pernikahan dan mengurangi jumlah anak, karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan kualitas hidup (BPS, 2020).

Norma budaya yang sebelumnya mendukung keluarga besar mulai bergeser ke nilai yang lebih individualistis dan berorientasi pada kualitas hidup, sehingga mempengaruhi pola fertilitas.

2.2.4 Teori Diffusi Inovasi

Teori Diffusi Inovasi menjelaskan bagaimana penyebaran teknologi dan ide baru, terutama dalam bidang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, memengaruhi perubahan perilaku fertilitas (Lesthaeghe, 1983). Inovasi teknologi kontrasepsi yang semakin mudah diakses dan diterima masyarakat akan mempercepat penurunan angka kelahiran.

Selain itu, penyebaran informasi melalui media massa, pendidikan, dan jaringan sosial berperan penting dalam mempercepat adopsi inovasi ini, terutama di daerah perkotaan. Tingkat pendidikan dan akses informasi yang lebih tinggi meningkatkan kesadaran pasangan tentang pentingnya mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak (WHO, 2021).

Di Indonesia, program Keluarga Berencana yang didukung oleh pemerintah dan berbagai lembaga juga merupakan bentuk inovasi sosial dan teknologi yang mendorong penggunaan kontrasepsi dan pengendalian kelahiran secara efektif (Bongaarts, 2017).

2.3 Studi Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak dari penurunan angka kelahiran, baik secara

global maupun khususnya di Indonesia. Studi-studi tersebut juga memberikan insight penting terkait strategi kebijakan yang dapat digunakan dalam mengantisipasi fenomena ini.

Salah satu penelitian penting yang dilakukan oleh Bongaarts (2017) menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam mengendalikan fertilitas dan angka kelahiran di berbagai negara. Bongaarts mengemukakan bahwa program Keluarga Berencana (KB) yang efektif—melalui peningkatan akses terhadap alat kontrasepsi dan edukasi kesehatan reproduksi—berperan signifikan dalam menurunkan fertilitas. Namun, ia juga menekankan bahwa perubahan sosial ekonomi seperti pendidikan perempuan, urbanisasi, dan perubahan norma sosial turut berkontribusi besar dalam mengubah perilaku reproduksi masyarakat secara jangka panjang. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh perubahan sosial yang mendasar agar penurunan angka kelahiran dapat berlangsung berkelanjutan.

Dalam Indonesia, penelitian Nugroho dan Hartono (2019) menggunakan data sensus penduduk dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) untuk menganalisis faktor-faktor penurunan angka kelahiran. Mereka menemukan bahwa peningkatan tingkat pendidikan perempuan dan status pekerjaannya memiliki korelasi yang kuat dengan penurunan angka kelahiran. Pendidikan yang lebih tinggi mendorong perempuan untuk menunda usia menikah dan membatasi jumlah anak yang diinginkan, karena adanya peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi serta peluang kerja yang lebih baik. Selain itu, urbanisasi yang membawa perubahan gaya hidup dan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan layanan kesehatan juga menjadi faktor penting dalam menurunkan fertilitas di Indonesia.

Studi yang dilakukan oleh Prasetyo, Rahmawati, dan Santoso (2020) menyoroti peran akses layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi dalam menurunkan angka kelahiran di daerah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa

daerah perkotaan dengan akses layanan kesehatan yang lebih baik mengalami penurunan angka kelahiran yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah pedesaan yang aksesnya masih terbatas. Selain akses fisik, edukasi dan penyuluhan tentang kontrasepsi juga sangat menentukan efektivitas penurunan angka kelahiran. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pemerataan layanan kesehatan reproduksi sebagai strategi utama untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia secara lebih merata.

Selain faktor ekonomi dan kesehatan, perubahan sosial budaya juga menjadi aspek yang tak kalah penting. Studi oleh Sari dan Wulandari (2021) meneliti bagaimana perubahan nilai-nilai sosial dan budaya keluarga mempengaruhi preferensi jumlah anak khususnya pada generasi muda di Indonesia. Mereka menemukan adanya pergeseran preferensi dari keluarga besar menuju keluarga kecil yang menekankan kualitas hidup. Faktor-faktor seperti urbanisasi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta pengaruh media massa dan teknologi informasi membuat generasi muda cenderung menunda pernikahan dan memilih memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit demi fokus pada pendidikan dan karier. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan nilai-nilai sosial yang berubah juga berkontribusi signifikan dalam penurunan angka kelahiran.

Studi-studi terdahulu tersebut mengindikasikan bahwa penurunan angka kelahiran merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang bersifat multidimensi, meliputi kebijakan pemerintah, faktor ekonomi, sosial budaya, serta akses dan teknologi kesehatan reproduksi.

Fenomena ini bukan hanya sekadar perubahan angka statistik, tetapi mencerminkan transformasi sosial yang lebih luas yang terjadi dalam masyarakat.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi literatur yang bertujuan untuk memahami secara holistik fenomena penurunan angka kelahiran. Fenomena ini memiliki dimensi yang sangat kompleks, melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan publik yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan untuk menggali fenomena ini secara lebih mendalam melalui interpretasi data sekunder, yang mencakup laporan resmi, jurnal akademik, serta studi kebijakan yang relevan. Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan secara langsung, melainkan menganalisis dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang ada, seperti laporan statistik dan dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan internasional.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terbagi dalam dua kategori besar. Pertama, data kuantitatif yang mencakup statistik dan informasi demografi, seperti yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk laporan Statistik Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Selain itu, laporan dari organisasi internasional seperti United Nations (UN DESA dan UNFPA), yang menyediakan data mengenai fertilitas dan proyeksi populasi global, juga menjadi sumber data penting. Laporan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), juga digunakan untuk mendalami data terkait indikator kesehatan reproduksi dan fertilitas di Indonesia.

Kedua, data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori-teori sosial ekonomi dan hasil analisis yang bersumber dari jurnal ilmiah internasional dan nasional. Beberapa karya penting, seperti karya Bongaarts (2017), Becker (1960, 1991), Cleland dan Wilson (1987), Lesthaeghe (1983), serta studi terkini dari Nugroho & Hartono (2019) dan Sari & Wulandari (2021), menjadi referensi utama dalam menganalisis dinamika penurunan fertilitas. Selain itu, media analitik dan portal kebijakan seperti Economica.id juga digunakan untuk memahami respon kebijakan serta persepsi masyarakat terkait dengan isu fertilitas.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis. Dimulai dengan identifikasi kata kunci yang relevan seperti "angka kelahiran", "fertilitas", "penurunan fertilitas", "kebijakan kependudukan", "kontrasepsi", dan "bonus demografi", yang akan digunakan untuk menelusuri literatur yang ada. Setelah itu, literatur yang ditemukan diseleksi berdasarkan keterkinian (5-10 tahun terakhir), kesesuaian dengan topik penelitian, dan kredibilitas sumbernya. Proses

selanjutnya adalah pengumpulan data statistik dari portal resmi seperti BPS, WHO, UNFPA, dan BKKBN.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan dua metode utama, yaitu analisis konten dan analisis tematik. Pada tahap analisis isi, informasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian dipilih dan dikelompokkan. Sementara itu, pada tahap analisis tematik, data dikategorikan ke dalam tema-tema besar seperti penyebab penurunan angka kelahiran, yang mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan. Selain itu, dampak dari penurunan angka kelahiran, baik dari segi demografi, ekonomi, maupun sosial, juga dianalisis. Terakhir, kebijakan yang telah diterapkan serta saran kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi penurunan angka kelahiran dianalisis dengan menggunakan berbagai teori seperti teori transisi demografi, teori ekonomi fertilitas, teori sosial budaya, dan teori difusi inovasi yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang penyebab, dampak, dan kebijakan terkait penurunan angka kelahiran di Indonesia.

4. Pembahasan

4.1 Penyebab Penurunan Angka Kelahiran Secara Global

4.1.1 Faktor sosial (perubahan peran perempuan, urbanisasi)

Transformasi peran perempuan merupakan salah satu pendorong utama penurunan angka kelahiran. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan karier profesional menciptakan pergeseran prioritas hidup, dari membangun keluarga pada usia muda menjadi pengembangan diri dan karier. Selain itu, urbanisasi telah menyebabkan perubahan dalam struktur sosial, di mana kehidupan perkotaan cenderung individualistik, biaya hidup tinggi, dan ruang tinggal terbatas. Ini mempengaruhi keputusan pasangan untuk menunda atau membatasi jumlah anak. Pola ini tampak pada negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, dan kini mulai terlihat di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya.

4.1.2 Faktor ekonomi (biaya hidup, ketidakpastian ekonomi)

Faktor ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan. Kenaikan biaya hidup, terutama terkait dengan perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok anak, membuat banyak pasangan merasa tidak siap secara finansial untuk memiliki anak. Selain itu, ketidakpastian ekonomi, seperti fluktuasi pasar kerja, inflasi, dan beban utang, membuat generasi muda merasa ragu dalam membangun keluarga. Ini mendorong munculnya fenomena *delay marriage* dan *delay childbirth*.

4.1.3 Faktor budaya (pergeseran nilai keluarga, gaya hidup)

Pergeseran nilai budaya terhadap makna keluarga turut berkontribusi. Pandangan bahwa keberhasilan hidup tidak harus ditentukan oleh pernikahan atau memiliki anak mulai tumbuh, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Selain itu, gaya hidup modern yang menekankan pada kebebasan, mobilitas, dan pengembangan diri juga menyebabkan pilihan gaya hidup *childfree* semakin diterima secara sosial di berbagai negara.

4.1.4 Faktor kesehatan dan akses kontrasepsi

Kemajuan dalam layanan kesehatan reproduksi, termasuk ketersediaan dan kemudahan akses terhadap alat kontrasepsi modern, berperan dalam pengendalian angka kelahiran. Di negara dengan sistem kesehatan yang mapan, pasangan dapat lebih mudah mengakses layanan perencanaan keluarga, yang memungkinkan mereka mengatur jarak dan jumlah kelahiran sesuai keinginan.

4.2 Dampak Penurunan Angka Kelahiran

4.2.1 Dampak demografis (penurunan populasi, penuaan).

Penurunan angka kelahiran berimplikasi pada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan populasi menua (*aging population*), yaitu meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut dibandingkan penduduk usia produktif. Kondisi ini mengarah pada fenomena *demographic trap*, di

mana populasi menyusut sementara kebutuhan akan perawatan dan pensiun meningkat.

4.2.2 Dampak ekonomi (tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi).

Penurunan kelahiran berdampak pada berkurangnya tenaga kerja usia produktif, yang berarti potensi *bonus demografi* tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam jangka panjang, ini menurunkan produktivitas nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Negara seperti Jepang menjadi contoh bagaimana penurunan angka kelahiran menghambat dinamika ekonomi, memaksa pemerintah menaikkan pajak dan mengimpor tenaga kerja asing.

- Dampak sosial (perubahan struktur keluarga, pelayanan sosial).

Perubahan struktur keluarga seperti berkurangnya jumlah anak dan meningkatnya rumah tangga tanpa anak menimbulkan tantangan baru dalam sistem sosial. Lansia yang hidup sendiri tanpa dukungan anak-anak akan membutuhkan sistem layanan sosial yang kuat. Selain itu, nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi fondasi sosial masyarakat juga berpotensi melemah.

- Dampak terhadap sistem jaminan sosial dan kesehatan.

Ketidakseimbangan antara jumlah pekerja muda (kontributor) dan lansia (penerima manfaat) dalam sistem jaminan sosial menimbulkan risiko ketidakberlanjutan fiskal. Beban pada sistem asuransi kesehatan dan dana pensiun akan meningkat, sementara jumlah iuran dari tenaga kerja produktif menurun, sehingga berpotensi menimbulkan defisit anggaran dan ketidakstabilan ekonomi nasional.

4.3 Studi Kasus: Situasi Angka Kelahiran di Indonesia

- Tren angka kelahiran dan fertilitas di Indonesia.

Tren angka kelahiran di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR)—yakni rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduktif—mengalami penurunan tajam dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi sekitar 2,18 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan jangka panjang dari program keluarga berencana (KB) nasional yang mulai diperkuat sejak Orde Baru.

Namun, setelah melewati era bonus demografi (2020–2035), Indonesia dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana mencegah angka kelahiran turun di bawah replacement level (yakni 2,1 anak per perempuan). Jika TFR turun di bawah angka ini dan bertahan dalam waktu lama, populasi Indonesia akan mengalami stagnasi bahkan penurunan, seperti yang kini dialami oleh negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura.

Selain itu, tren pernikahan pun mengalami perubahan. Berdasarkan data dari Kementerian Agama dan BKKBN, usia rata-rata menikah meningkat menjadi 23,4 tahun untuk perempuan dan 25,9 tahun untuk laki-laki pada tahun 2022, dibandingkan dengan usia 20-an awal pada dua dekade sebelumnya. Hal ini berkaitan langsung dengan meningkatnya usia kelahiran anak pertama dan jarak antar kelahiran yang lebih panjang.

- Faktor spesifik di Indonesia yang mempengaruhi angka kelahiran.

Beberapa faktor spesifik yang memengaruhi penurunan angka kelahiran di Indonesia meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang:

- Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Karier Perempuan
Semakin banyak perempuan Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi dan memilih untuk bekerja sebelum menikah atau memiliki anak. Fenomena ini menunda usia pernikahan dan kelahiran anak pertama. Data dari BPS

menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di pendidikan tinggi dan pasar kerja meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir.

- Perubahan Gaya Hidup dan Nilai Keluarga

Generasi milenial dan Gen Z menunjukkan kecenderungan untuk lebih selektif dalam membangun keluarga. Ada peningkatan jumlah pasangan muda yang memilih gaya hidup *childfree* atau *child-delay*, dengan alasan karier, biaya hidup, kesehatan mental, atau keinginan hidup bebas tanpa beban pengasuhan anak.

- Biaya Hidup dan Pendidikan yang Tinggi

Biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan di wilayah urban meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan. Hal ini membuat pasangan menunda memiliki anak karena beban finansial yang tinggi. Misalnya, di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, biaya membesarkan anak hingga jenjang perguruan tinggi bisa mencapai ratusan juta rupiah.

- Urbanisasi dan Migrasi Internal

Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan terjadinya perubahan nilai sosial dan tekanan ekonomi. Lingkungan urban yang kompetitif, ruang tinggal sempit, dan kurangnya dukungan sosial dari keluarga besar menyebabkan pasangan memilih keluarga kecil atau bahkan tidak memiliki anak.

- Persepsi terhadap Peran Ayah dan Ibu

Masih rendahnya keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan anak dan rumah tangga dapat menjadi beban psikologis bagi perempuan. Tanpa dukungan dari pasangan atau negara (seperti cuti melahirkan/paternitas, subsidi anak), perempuan cenderung ragu untuk memiliki lebih dari satu anak.

- Dampak yang sudah dirasakan.

Penurunan angka kelahiran mulai menunjukkan dampaknya di berbagai sektor:

- Perubahan Struktur Demografi

Data BPS menunjukkan bahwa Indonesia tengah memasuki fase “menua sebelum kaya” (*aging before wealthy*). Proporsi penduduk usia lanjut (di atas 60 tahun) diperkirakan meningkat dari 9,5% pada 2022 menjadi lebih dari 19% pada 2045. Hal ini berimplikasi pada naiknya kebutuhan layanan kesehatan lansia dan pensiun.

- Ketimpangan Antardaerah

Beberapa daerah seperti Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta sudah menunjukkan angka fertilitas di bawah 2,1. Hal ini berbeda dengan beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur atau Papua yang masih memiliki angka fertilitas tinggi. Ketimpangan ini dapat menyebabkan distribusi penduduk yang tidak seimbang di masa depan.

- Menurunnya Peserta Didik

Di beberapa daerah urban dan suburban, jumlah siswa sekolah dasar menurun, memengaruhi alokasi anggaran pendidikan, tenaga pengajar, dan efisiensi fasilitas pendidikan. Fenomena ini terlihat di DKI Jakarta dan Yogyakarta, di mana beberapa sekolah dasar negeri mengalami pengurangan jumlah rombongan belajar.

- Tantangan Ekonomi dan Sosial Jangka Panjang

Jika angka kelahiran terus menurun, Indonesia bisa kehilangan potensi bonus demografi dan menghadapi kekurangan tenaga kerja produktif. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu kesinambungan sistem

jaminan sosial, dan memaksa pemerintah mencari alternatif seperti peningkatan produktivitas atau membuka keran migrasi tenaga kerja.

4.4 Antisipasi dan Kebijakan Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis guna mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Salah satu kebijakan utama yang diimplementasikan sejak awal era Orde Baru adalah Program Keluarga Berencana (KB), yang bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran melalui penyuluhan kepada masyarakat, pemberian alat kontrasepsi secara gratis, serta penguatan layanan kesehatan reproduksi di tingkat desa dan kecamatan. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui edukasi mengenai pentingnya pengaturan kelahiran, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi perempuan, yang berperan aktif dalam menyosialisasikan program ini. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari penurunan angka kelahiran nasional yang signifikan sejak diterapkan.

Selain Program KB, pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan berbagai insentif sosial dan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan kependudukan yang tidak langsung. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan. Program-program ini memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya jaminan sosial berupa program-program ini, keluarga dapat lebih mempertimbangkan secara rasional jumlah anak yang mereka miliki, karena kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sudah mendapatkan dukungan dari negara. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan ekonomi

bagi keluarga miskin, sekaligus mengurangi angka kelahiran di kalangan keluarga yang lebih rentan.

Namun, meskipun secara historis Program KB terbukti berhasil menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dari lebih dari lima anak per wanita pada tahun 1970-an menjadi sekitar 2,3 pada awal 2000-an, efektivitas program ini dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan bahkan menurun di beberapa wilayah. Beberapa faktor yang menyebabkan stagnasi ini antara lain terbatasnya akses terhadap layanan KB di wilayah perbatasan dan pedesaan, rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, serta kurangnya inovasi dalam pendekatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, meskipun insentif sosial seperti PKH telah berhasil meningkatkan indikator kesejahteraan rumah tangga, program ini tidak serta-merta berdampak langsung terhadap penurunan angka kelahiran. Hal ini terjadi karena kebijakan kependudukan dan kebijakan pembangunan lainnya sering kali berjalan secara terpisah, tanpa adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait. Keberadaan kebijakan yang tidak terintegrasi ini menyebabkan pendekatan yang digunakan lebih bersifat sektoral, sehingga kurang efektif dalam memberikan solusi jangka panjang.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. Pertama, Program KB perlu diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan aplikasi pelayanan keluarga berencana dan konsultasi daring dapat membantu menjangkau generasi muda dan masyarakat di wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan tradisional. Pendekatan digital ini juga dapat memudahkan distribusi informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami pentingnya pengaturan kelahiran. Di samping itu, edukasi mengenai kesehatan reproduksi perlu menjadi bagian dari kurikulum di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan

literasi generasi muda terkait dengan pentingnya pengaturan kelahiran dan kesehatan reproduksi.

Kedua, insentif sosial dan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah harus lebih terintegrasi dengan program-program KB dan pengembangan sumber daya manusia. Misalnya, pemberian insentif tambahan bagi keluarga dengan dua anak atau kurang yang aktif mengikuti pelatihan keterampilan atau terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk tidak hanya memanfaatkan bantuan sosial tetapi juga berkontribusi aktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pengendalian angka kelahiran.

Ketiga, sinkronisasi kebijakan kependudukan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah sangat diperlukan agar pengendalian penduduk tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan perencanaan wilayah. Pemerintah harus memastikan bahwa program-program terkait kependudukan dan pengendalian angka kelahiran dapat terintegrasi dengan kebijakan pembangunan lainnya, sehingga mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap angkatan kerja usia produktif secara optimal, sehingga potensi bonus demografi yang muncul akibat penurunan angka kelahiran dapat benar-benar memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan akses ke pasar kerja yang lebih luas, agar angkatan kerja yang ada dapat berpartisipasi secara produktif dalam perekonomian.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia diharapkan dapat lebih efektif dalam mengendalikan angka kelahiran dan memanfaatkan potensi demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Kesimpulan

Penurunan angka kelahiran merupakan fenomena demografis global yang kini mulai dirasakan dampaknya di Indonesia. Penurunan ini terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti meningkatnya pendidikan dan partisipasi kerja perempuan, urbanisasi, pergeseran nilai budaya, mahalnya biaya hidup dan pendidikan anak, serta semakin luasnya akses terhadap layanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Fenomena ini tidak hanya menandai keberhasilan program keluarga berencana dan perbaikan kualitas hidup, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi masa depan pembangunan nasional.

Secara demografis, penurunan angka kelahiran menyebabkan proporsi penduduk usia lanjut meningkat lebih cepat dibandingkan usia produktif, yang dapat menghambat pemanfaatan bonus demografi dan menimbulkan tekanan pada sistem jaminan sosial dan layanan kesehatan. Secara ekonomi, hal ini berpotensi mengurangi tenaga kerja produktif dan menghambat pertumbuhan. Dari sisi sosial, perubahan struktur keluarga dan meningkatnya jumlah rumah tangga tanpa anak menimbulkan kebutuhan baru terhadap sistem perlindungan sosial. Apabila tren ini terus berlangsung tanpa intervensi kebijakan yang tepat, Indonesia akan menghadapi risiko stagnasi populasi, beban fiskal yang meningkat, dan ketidakseimbangan struktur usia penduduk yang menyulitkan kesinambungan pembangunan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. BPS RI.

Becker, G. S. (1960). An economic analysis of fertility. In *Demographic and economic change in developed countries* (pp. 209–240). Princeton University Press.

Becker, G. S. (1991). *A treatise on the family*. Harvard University Press.

- Bongaarts, J. (2017). The effect of population policies on fertility. *Population and Development Review*, 43(S1), 83–106. <https://doi.org/10.1111/padr.12089>
- Cleland, J., & Wilson, C. (1987). Demand theories of the fertility transition: An iconoclastic view. *Population Studies*, 41(1), 5–30. <https://doi.org/10.1080/0032472031000149536>
- Economica.id. (2024). "Tantangan dan Solusi Fenomena Penurunan Fertilitas di Indonesia." Diakses dari economica.id.
- Laporan Program Keluarga Berencana Nasional. (2023). Jakarta: BKKBN.
- Lesthaeghe, R. (1983). A century of demographic and cultural change in Western Europe: An exploration of underlying dimensions. *Population and Development Review*, 9(3), 411–435. <https://doi.org/10.2307/1972149>
- Notestein, F. W. (1945). Population—the long view. In *Food for the world* (pp. 36–57). University of Chicago Press.
- Nugroho, Y., & Hartono, S. (2019). Pendidikan perempuan dan penurunan angka kelahiran di Indonesia. *Jurnal Demografi Indonesia*, 13(2), 45-60.
- Prasetyo, E., Rahmawati, F., & Santoso, P. (2020). Pengaruh akses layanan kesehatan reproduksi terhadap angka kelahiran di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(1), 12-25.
- Sari, D. P., & Wulandari, R. (2021). Perubahan nilai sosial dan budaya keluarga kecil pada generasi muda di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), 77-91.
- United Nations. (2019). *World population prospects 2019*. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. <https://population.un.org/wpp/>

Wang, Xueqing. (2024). "Prediksi Populasi Tiongkok dan Implikasinya terhadap Perekonomian Nasional." *Jurnal Multikultura*, 3(3), 467-491.

World Health Organization. (2021). *Reproductive health indicators: Guidelines for their generation, interpretation and analysis for global monitoring*. WHO Press.

Wu, Su, dan Li. (2023). "Dampak Penurunan Angka Kelahiran terhadap Struktur Keluarga dan Ekonomi di Tiongkok." *Jurnal Multikultura*, 3(3), 467-491.